PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 13340
(+6221) 8067 9200
adwijaya@wika.co.id
www.wika.co.id

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00291/2025 6 November 2025
Lampiran : 1 Halaman

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan**

Dengan Hormat,
Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Sukuk Mudharabah ("RUPSU") yang akan diselenggarakan pada :

- **4 Desember 2025** yaitu :
  - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
  - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- **5 Desember 2025** yaitu :
  - Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
  - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- **8 Desember 2025** yaitu :
  - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
  - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPO dan RUPSU yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Kamis, 6 November 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

LELANG SUN, PEMERINTAH SERAP DANA SEBANYAK RP 28 TRILIUN

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp87,49 triliun.

ISTIMEWA

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Jakarta, HanTer - "Lebih rendah dari penawaran masuk pada lelang terakhir Rp117,5 triliun pada 21 Oktober 2025," ungkap DJPPR dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Adapun serapan terbesar pada lelang kali ini berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp7,15 triliun dari penawaran masuk Rp17,73 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,405 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Serapan berikutnya berasal dari FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,6 triliun dari penawaran masuk Rp23,73 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,12318 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, dari seri SPN12261105 (penerbitan baru) dimenangkan nominal sebesar Rp4 triliun dari penawaran masuk Rp5,88 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,60000 persen dengan jatuh tempo 5 November 2026.

Dari seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan nominal Rp3,4 triliun dari penawaran masuk Rp5,43 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,75993 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Dari seri FR0102 (pembukaan kembali) dimenangkan nominal sebesar Rp2,2 triliun dari penawaran masuk Rp5,61 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,73989 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,15 triliun dari seri FR0107 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,52937 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Dari seri SPN01251206 (penerbitan baru) diserap dana sebesar Rp2 triliun dari penawaran masuk Rp4,5 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,52000 persen dengan jatuh tempo 6 Desember 2025.

Pemerintah selanjutnya menyerap dana sebesar Rp1,5 triliun dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp20,16 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,54931 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Terakhir, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1 triliun dari seri SPN12260205 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,27 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,59000 persen dengan jatuh tempo 5 Februari 2026.

Sementara itu, selisih imbal hasil (spread) SUN seri benchmark tenor 10 tahun dengan US Treasury tenor 10 tahun juga turun ke level 221 bps pada akhir triwulan III-2025 dan 196 bps pada 31 Oktober 2025.

Lebih lanjut, pasar perdana SBN juga terjaga kuat dengan bid to cover ratio mencapai 3,86 kali selama triwulan III-2025.

"Kinerja pasar SBN didukung oleh likuiditas domestik yang memadai, kinerja fiskal yang kuat, serta prospek perekonomian domestik yang solid," kata Menteri Keuangan Purbaya.

■ **Danial**

Pakar: Pasar Modal Bisa Tarik 50 Miliar Dolar AS Jika Likuiditas Dibenahi

Jakarta, HanTer - Pakar manajemen investasi (global investment strategist) Chapman Taylor memprediksi terdapat aliran modal asing 50 miliar dolar AS, yang siap masuk ke pasar modal Indonesia jika persoalan rendahnya likuiditas segera dibenahi.

Chapman, dalam diskusi dengan media di Jakarta, Rabu (5/11/2025) mengatakan likuiditas yang rendah masih menjadi permasalahan pasar modal Indonesia sehingga saham-saham di Indonesia kurang aktif diperdagangkan.

"Berdasarkan perhitungan saya, ada sekitar 50 miliar dolar AS dana global yang siap masuk ke Indonesia kalau masalah likuiditas ini bisa diselesaikan. Bayangkan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Chapman.

Dijelaskannya, para investor global telah lama melihat potensi besar di Indonesia, mulai dari faktor demografi, prospek pertumbuhan ekonomi, hingga tata kelola yang semakin baik. Namun permasalahan rendahnya likuiditas masih menghalangi aliran modal asing yang lebih besar untuk masuk.

"Hampir semua investor global yang kami temui di London mengatakan ingin berinvestasi lebih banyak di Indonesia. Mereka melihat valuasi yang menarik," ungkapnya.

Chapman menyoroti salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah likuiditas ini adalah dengan meningkatkan porsi saham publik atau free float di pasar modal.

Ia memberi contoh India yang memiliki aturan proporsi saham publik di pasar modal dengan batas minimum free float sebesar 30 persen, sementara Indonesia baru 7,5 persen.

Menurut dia, peningkatan free float akan menciptakan efek bola salju positif bagi pasar yakni likuiditas meningkat, valuasi membaik, dan modal asing masuk lebih banyak.

"Ruang pertumbuhannya masih sangat besar, asal regulasi free float dan likuiditas segera dibenahi," ujar Chapman, yang memiliki puluhan tahun pengalaman profesional dalam industri investasi.

Mengacu pada Pasal 35 huruf E Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Tahun 2021, setiap saham wajib memenuhi free float minimal 7,5 persen dari total saham yang dicatatkan di pasar modal.

■ **Danial**

Multi Makmur Lemindo Raih Pendapatan Rp25,98 Miliar

Jakarta, HanTer - Perusahaan produsen pipa PVC PT Multi Makmur Lemindo Tbk (Kode saham: PIPA) membukukan pendapatan usaha senilai Rp25,89 miliar per kuartal III-2025, atau tumbuh 30,49 persen year on year (yoy) dibandingkan senilai Rp19,84 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Seiring pertumbuhan itu, perseroan mencatatkan laba bersih senilai Rp2,66 miliar per kuartal III-2025, atau berbalik positif dibandingkan rugi bersih senilai Rp691,38 juta pada periode sama tahun sebelumnya.

Analis pasar modal sekaligus Founder Entry Exit Investment Indrawijaya Rangkuti dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menilai transformasi di bawah PT Morris Capital Indonesia (MCI) menjadi momentum strategis bagi PIPA.

"Dengan skema injeksi aset sebesar Rp3 triliun, PIPA berpotensi keluar dari bayang--bayang masa lalu dan menjadi bagian penting dalam tulang punggung energi Indonesia," ujar Indrawijaya.

Menurut dia, langkah integrasi vertikal yang dijalankan oleh MCI mencakup perdagangan energi, logistik, hingga infrastruktur penyimpanan, sejalan dengan kebutuhan jangka panjang sektor energi nasional.

"Jika dieksekusi dengan presisi, valuasi PIPA bisa melesat jauh di atas harga pasar saat ini," ujar Indrawijaya.

Seiring raihan laba bersih, laba per saham (EPS) perseroan turut tumbuh menjadi Rp0,91 per saham per kuartal III-2025, dibandingkan sebesar Rp0,22 per saham pada periode sama tahun sebelumnya,

Di sisi neraca, total aset lancar perseroan tumbuh menjadi Rp66,93 miliar per kuartal III-2025, dibandingkan senilai Rp64,56 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Per kuartal III-2025, perseroan mencatatkan perbaikan struktur keuangan melalui penurunan liabilitas jangka pendek menjadi Rp18,74 miliar,

ISTIMEWA

ILUSTRASI

dibandingkan senilai Rp22,97 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Penurunan liabilitas jangka pendek tersebut didorong oleh pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Kemudian, liabilitas jangka panjang perseroan ikut turun menjadi Rp1,57 miliar per kuartal III-2025, dibandingkan senilai Rp5,33 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, ekuitas perseroan tumbuh menjadi Rp149,54 miliar per kuartal III-2025, dibandingkan senilai Rp146,68 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

■ **Danial**

Komisi IV Setujui Tambahan Anggaran Rp2 Triliun untuk KKP Bangun 10 Kapal

Jakarta, HanTer - Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk membangun 10 kapal pengawasan baru melalui pinjaman luar negeri dari Pemerintah Spanyol.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

"Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol," kata Titiek membacakan kesimpulan rapat kerja tersebut, Rabu (5/11/2025).

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Proyek MFISS diharapkan juga dapat mencegah kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan sekaligus memperkuat sistem pemantauan sumber daya laut berbasis teknologi terpadu.

ISTIMEWA

KETUA Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto

"Apakah bisa disetujui?" tanya Titiek kepada anggota Komisi IV DPR RI. "Setuju," jawab para anggota Komisi IV DPR RI.

■ **Danial**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"RUPSU"**) di Jakarta, pada hari **Jumat,** tanggal **5 Desember 2025**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis,** tanggal **20 November 2025**.

Jakarta, 6 November 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA Tbk**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"RUPO"**) di Jakarta, pada hari **Senin,** tanggal **8 Desember 2025**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis,** tanggal **20 November 2025**.

Jakarta, 6 November 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA Tbk**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"RUPSU"**) di Jakarta, pada hari **Senin,** tanggal **8 Desember 2025**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis,** tanggal **20 November 2025**.

Jakarta, 6 November 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA Tbk**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"RUPO"**) di Jakarta, pada hari **Jumat,** tanggal **5 Desember 2025.**

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis,** tanggal **20 November 2025**.

Jakarta, 6 November 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA Tbk**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 (**"RUPSU"**) di Jakarta, pada hari **Kamis,** tanggal **4 Desember 2025**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis,** tanggal **20 November 2025**.

Jakarta, 6 November 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA Tbk**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 11, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 (**"RUPO"**) di Jakarta, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Desember 2025.**

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis**, tanggal **20 November 2025**.

Jakarta, 6 November 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA Tbk**